

**PENGELOLAAN DANA BOS PADA SD NEGERI DI UPT PELAYANAN PENDIDIKAN  
KECAMATAN MOYUDAN KABUPATEN SLEMAN**

Irene Muryati

SDN Ngijon 3 Moyudan, Sleman, Yogyakarta

[irenmy72@yahoo.co.id](mailto:irenmy72@yahoo.co.id)

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) perencanaan, (2) pelaksanaan, (3) pengawasan dan evaluasi pengelolaan, serta (4) pelaporan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Dasar Negeri dengan jumlah siswa sedikit dan jumlah siswa banyak di wilayah UPT Pelayanan Pendidikan Kecamatan Moyudan. Jenis penelitian ini adalah studi kasus. Responden penelitian ini yaitu kepala sekolah, bendahara, guru, komite sekolah, dan orang tua siswa. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan studi dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) perencanaan pengelolaan dana BOS diprioritaskan untuk peningkatan mutu, namun partisipasi warga sekolah kurang optimal. (2) Pada pelaksanaan: (a) penyaluran dana dilaksanakan di awal triwulan, (b) proses pembukuan dilaksanakan secara rutin, dan (c) prinsip akuntabilitas dan keterbukaan telah dilaksanakan dengan baik. (3) pengawasan dilaksanakan oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah dengan memeriksa SPJ BOS; evaluasi dilakukan dengan mengisi angket pelaksanaan sekali dalam setahun oleh TIM Manajemen BOS Kabupaten. (4) Pelaporan penggunaan dana BOS dalam bentuk SPJ dilaksanakan setiap triwulan kepada Tim Manajemen BOS Kabupaten melalui UPT Pelayanan Pendidikan.

*Kata kunci: Pengelolaan, Dana Bantuan Operasional Sekolah.*

**BOS FUNDS MANAGEMENT ON STATE ELEMENTARY SCHOOLS IN THE  
DISTRICT MOYUDAN EDUCATION SERVICES UNIT SLEMAN REGENCY**

Irene Muryati

SDN Ngijon 3 Moyudan, Sleman, Yogyakarta

[irenmy72@yahoo.co.id](mailto:irenmy72@yahoo.co.id)

**Abstract**

*This study aims to reveal: (1) the planning, (2) implementation, (3) monitoring and evaluation, and (4) reporting of the management of School Operational Fund (BOS) on public elementary schools which has small and a big number of students in the District Moyudan Education. Respondents were the principals, treasurers, teachers, school committees, and parents of students. Data collection techniques were interviews, observation and document study. The results of this study indicate that: (1) the fund was prioritized for student activities to improve the quality of education but community participation were limited. (2) The implementation which includes: (a) the distribution of funds is done in the beginning of the quarter, (b) accounting process is carried out on a regular basis, and (c) the principles of accountability and transparency has been implemented properly. (3) monitoring is conducted by the principal and school superintendent; evaluation of the implementation is done by filling the questionnaire once a year by the District Management BOS Team. (4) reporting is done every three months to the BOS Management Team.*

*Keywords: Management, School Operational Fund.*

## Pendahuluan

Pemerataan pendidikan dasar (SD dan SMP) bagi semua warga negara diupayakan pemerintah melalui program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mulai tahun 2005. Program BOS membebaskan biaya pendidikan bagi siswa SD dan SMP yang tidak mampu dan meringankan beban bagi siswa yang lain dalam rangka mendukung pencapaian Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (Wajar 9 tahun).

Sehingga pemerintah melaksanakan program BOS yang menyediakan bantuan bagi sekolah untuk tingkat SD dan SMP dengan tujuan membebaskan biaya pendidikan bagi siswa yang tidak mampu dan meringankan beban bagi siswa yang lain.

Sasaran program BOS adalah semua sekolah SD/SDLB dan SMP/SMPLB/SMPT, negeri dan swasta termasuk SD-SMP Satu Atap (SATAP) dan tempat Kegiatan Belajar Mandiri (TKB Mandiri) yang diselenggarakan oleh masyarakat, baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia. Besar biaya satuan BOS yang diterima oleh sekolah, dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan ketentuan: (1) SD/SDLB: Rp580.000/siswa/tahun, (2) SMP/SMPLB/SMPT/SATAP: Rp710.000/siswa/tahun.

Penyaluran dana dilakukan setiap 3 bulan, yaitu periode Januari-Maret, April-Juni, Juli-September, dan Oktober-Desember. Pada tahun anggaran 2013, dana BOS diberikan selama 12 bulan untuk periode Januari sampai dengan Desember 2013, yaitu Triwulan I dan II tahun anggaran 2013 tahun ajaran 2012/2013 dan Triwulan III dan IV tahun anggaran 2013 tahun ajaran 2013/2014.

Dana BOS diterima oleh sekolah secara utuh, dan dikelola secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan dewan guru dan Komite Sekolah dengan menerapkan MBS dalam Juknis BOS Ditjen Dikdas (2011, p. 7), yang menyatakan bahwa: (1) sekolah mengelola dana secara profesional, transparan dan akuntabel; (2) sekolah harus memiliki Rencana Jangka Menengah yang disusun 4 tahunan; (3) sekolah harus

menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam bentuk Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), dimana dana BOS merupakan bagian integral dari RKAS tersebut; (4) Rencana Jangka Menengah dan RKAS harus disetujui dalam rapat dewan pendidik setelah memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah dan disahkan oleh SKPD Pendidikan Kabupaten/kota (untuk sekolah negeri) atau yayasan (untuk sekolah swasta).

Manajemen keuangan sekolah pada prinsipnya adalah aktivitas yang mengatur keuangan sekolah mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan sekolah. Kegiatan di sekolah yang sangat kompleks membutuhkan pengaturan yang baik. Keuangan di sekolah merupakan bagian yang amat penting karena setiap kegiatan butuh uang. Keuangan juga perlu diatur sebaik-baiknya. Untuk itu perlu manajemen keuangan yang baik. Sebagaimana yang terjadi di substansi manajemen pendidikan pada umumnya, kegiatan manajemen keuangan dilakukan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan atau pengendalian.

Tugas utama para pengelola/*manager* adalah pada kegiatan perencanaan dan pengawasan. Dalam suatu usaha, pemerintah dan kelompok kegiatan, suatu sistem perencanaan dan pengawasan (disebut juga manajerial penganggaran) secara luas digunakan, hal ini menunjukkan tanggung jawab perencanaan dan pengawasan. Menjadi pengawas bagi suatu sekolah tidak mudah, untuk itu perlu adanya keterlibatan semua komponen (Welsch, 1988, p.1).

Laporan melihat kemajuan melalui rekaman, penelitian dan penyelidikan maupun penyelidikan bahwa segala sesuatu sesuai rencana dan membuat perbaikan ketika dibutuhkan kemudian disampaikan kepada pemimpin yang bertanggung jawab. Seperti yang dikemukakan Lunenburg & Ornstein (2000, p. 6), yaitu: *Reporting verifies progress through records, research, and inspection; ensures that things happen according to plan; takes arty corrective action when*

necessary; and keeps those to whom the chief executive is responsible informed. Dapat diartikan bahwa pelaporan memverifikasi kemajuan melalui catatan, penelitian, dan inspeksi, memastikan bahwa sesuatu terjadi sesuai rencana yang telah ditetapkan, mengambil tindakan korektif artinya bila diperlukan rencana dapat segera ditata ulang, dan membuat orang-orang kepada siapa eksekutif bertanggung jawab informasi. Bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan dengan mencatat, meneliti, dan menginspeksi merupakan laporan yang harus dibuat oleh para pemimpin dalam memverifikasi kemajuan suatu kegiatan.

Program BOS merupakan upaya pemerintah menyukseskan Wajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun yang menyangkut pembiayaan pendidikan di Indonesia. Hallak (1969, p. 13) mendefinisikan tentang konsep biaya yaitu: *...the real cost corresponds to the opportunity cost; it is assumed that throughout the economic life of any good there is always a choice of alternatives, and that the cost of any choice must be expressed in terms of the 'opportunity forgone' to achieve the alternatives.* Artinya biaya riil sesuai dengan biaya kesempatan, diasumsikan bahwa seluruh kehidupan ekonomi selalu ada pilihan alternatif, dan bahwa biaya pilihan apapun harus dinyatakan dalam hal 'kesempatan yang hilang' untuk mencapai alternatif tersebut.

Mulyono (2010, p. 77) mendefinisikan bahwa Pembiayaan pendidikan pada dasarnya adalah menitikberatkan upaya pendistribusian benefit pendidikan dan beban yang harus ditanggung masyarakat. Biaya secara sederhana adalah sejumlah nilai uang yang harus dibelanjakan atau jasa pelayanan yang diserahkan pada siswa. Pembiayaan pendidikan berhubungan dengan distribusi beban pajak dalam berbagai jenis pajak, kelompok manusia serta metode pengalihan pajak sekolah. Hal yang penting dalam pembiayaan pendidikan adalah berupa besar uang yang harus dibelanjakan, dari mana sumber uang yang diperoleh, dan kepada siapa uang harus dibelanjakan.

Fattah (2004, p. 25) mendefinisikan bahwa: Konsep biaya pendidikan sifatnya lebih kompleks dari keuntungan, karena komponen biaya terdiri dari lembaga jenis dan sifatnya. Biaya pendidikan bukan hanya berbentuk uang atau rupiah, tetapi juga dalam bentuk biaya kesempatan (*opportunity cost*). Biaya kesempatan ini sering disebut "*income forgon*". *Income forgon* yaitu potensi pendapatan bagi seorang siswa selama ia mengikuti pelajaran atau studi.

Supriadi (2006, p. 4) dalam penjelasannya mengkategorikan biaya pendidikan meliputi beberapa hal: biaya langsung (*direct cost*), biaya tidak langsung (*indirect cost*), biaya pribadi (*private cost*), dan biaya sosial (*social cost*) dalam bentuk *moneter* maupun *nonmoneter*.

Di dalam Bab IX Pasal 62 Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan disebutkan standar pembiayaan meliputi: (1) pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal; (2) biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap; (3) biaya personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan; (4) biaya operasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: (a) gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji (b) bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan (c) biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa, telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.

Pembiayaan pendidikan menurut beberapa ahli dan peraturan pemerintah dapat disimpulkan bahwa pembiayaan pendidikan merupakan biaya yang harus dikeluarkan dalam bentuk biaya langsung dan tidak langsung yang bersumber dari

pemerintah maupun pribadi dalam bentuk uang, barang ataupun tenaga.

Pemerintah meningkatkan mutu produk pendidikan dengan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun. Upaya pemerintah untuk melaksanakan wajar pendidikan sembilan tahun dengan meluncurkan program BOS. Program ini bertujuan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa yang tidak mampu dan meringankan bagi siswa yang lain.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Juknis Penggunaan dan pertanggungjawaban Keuangan Dana BOS tahun 2013. Penggunaan dana BOS telah diatur dalam juknis yang meliputi 13 item komponen penggunaan. BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu. Hal ini berkaitan dengan pemerataan pendidikan bagi semua warga negara tanpa terkecuali, sehingga rakyat miskinpun mempunyai kesempatan untuk menngenyam pendidikan. Secara khusus program BOS bertujuan untuk: (1) membebaskan pungutan bagi seluruh siswa SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SMPT (Terbuka) negeri terhadap biaya operasi sekolah; (2) membebaskan pungutan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta; (3) meringankan beban biaya operasi sekolah bagi siswa di sekolah swasta.

Dana BOS yang telah digulirkan diharapkan dapat mencapai sasaran yaitu pemerataan pendidikan sehingga semua warga negara mempunyai kesempatan menngenyam pendidikan. Dengan menngenyam pendidikan tentunya taraf hidup semakin meningkat dan dapat mengentaskan kemiskinan di negara kita. Dengan tujuan tersebut penggunaan dana BOS di sekolah harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (1)

prioritas utama penggunaan dana BOS adalah untuk kegiatan operasional sekolah; (2) bagi sekolah yang telah menerima DAK, tidak diperkenankan menggunakan dana BOS untuk peruntukan yang sama. Sebaliknya jika dana BOS tidak mencukupi untuk pembelanjaan yang diperbolehkan (13 item pembelanjaan) maka sekolah dapat mempertimbangkan sumber pendapatan lain yang diterima oleh sekolah, yaitu pendapatan hibah (misalnya DAK) dan pendapatan sekolah lainnya yang sah dengan tetap memperhatikan peraturan terkait; (3) Biaya transportasi dan uang lelah guru PNS yang bertugas di luar jam mengajar harus mengikuti batas kewajaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; (4) Bunga Bank/Jasa Giro akibat adanya dana di rekening sekolah menjadi milik sekolah dan digunakan untuk keperluan sekolah.

Pemerintah menetapkan aturan di atas untuk menegaskan, bahwa penggunaan/pembelanjaan dana BOS untuk belanja operasional satuan pendidikan sesuai dengan juknis yang telah ditetapkan. Dana BOS dalam pembelanjannya harus sesuai dengan juknis BOS 2013 yang didalamnya ada 13 item pembelanjaan, akan tetapi tidak semua biaya operasional satuan pendidikan dapat dibiayai oleh BOS seperti misalnya: pembelian LKS, kegiatan pentas seni siswa di akhir tahun pelajaran, dan kegiatan perayaan hari besar keagamaan yang bisa meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) perencanaan, (2) pelaksanaan, (3) pengawasan dan evaluasi pengelolaan, serta (4) pelaporan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Dasar Negeri dengan jumlah siswa sedikit dan jumlah siswa banyak di wilayah UPT Pelayanan Pendidikan Kecamatan Moyudan.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus yang dilaksanakan pada dua sekolah dasar negeri, yang memiliki jumlah murid yang berbeda. Perbedaan

jumlah murid yang tidak sama mempengaruhi jumlah penerimaan dana BOS, sedangkan penggunaan dana BOS sudah diatur dalam Juknis BOS tahun 2013. Perbedaan penerimaan dana akan mempengaruhi pengelolaannya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian studi kasus. Penelitian ini dilakukan di sekolah dasar yang ada di UPT Pelayanan Pendidikan Kecamatan Moyudan yaitu di SD Negeri D dengan jumlah murid yang sedikit (66 orang) dan di SD Negeri K dengan jumlah murid banyak (178 orang). Dilaksanakan pada bulan Desember 2013 sampai dengan bulan Februari 2014.

Subjek penelitian ini adalah Sekolah Dasar di UPT Pelayanan Pendidikan Kecamatan Moyudan, yaitu SDN D dengan jumlah siswa penerima dana BOS 66 siswa dan SDN K dengan penerima dana BOS 178 siswa. Objek penelitian ini tujuan mengetahui pengelolaan dana BOS pada sekolah dasar di UPT Pelayanan Pendidikan Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman dengan jumlah siswa sedikit dengan sekolah dasar dengan jumlah siswa yang besar. Nara sumber penelitian ini informasi dan data didapat dari, 2 (dua) kepala sekolah, 2 (dua) bendahara sekolah, 6 (enam) orang guru, 2 (dua) orang pengurus komite sekolah, 6 (enam) orang tua siswa agar sedapat mungkin menggambarkan proses pengelolaan keuangan secara utuh dan apakah telah sesuai dengan tujuan dari program BOS.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan studi dokumen. Observasi di SD Negeri D dan SD Negeri K dilaksanakan dengan metode atau cara-cara yang menganalisis, mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku nara sumber yaitu kepala sekolah, bendahara, guru, komite, dan orangtua siswa dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung. Observasi juga dilaksanakan dengan mengamati keadaan sarana dan prasarana sekolah. Dengan observasi di SD Negeri D dan SD Negeri K, peneliti akan lebih mampu memahami konteks data

dalam keseluruhan situasi sosial, jadi akan dapat diperoleh pandangan yang menyeluruh tentang pengelolaan dana BOS.

Teknik wawancara ini dimaksudkan untuk mengumpulkan data primer yang dilakukan secara mendalam dimana peneliti melakukan komunikasi timbal balik dengan nara sumber yaitu kepala sekolah, bendahara, guru, komite sekolah, dan orangtua siswa untuk memperoleh data atau informasi dari beberapa informan berdasarkan serangkaian pertanyaan sebagaimana tertera dalam pedoman wawancara. Teknik triangulasi nara sumber digunakan untuk mengecek data yang diperoleh. Tujuannya untuk memperoleh data secara mendalam mengenai pengelolaan dana BOS di sekolah. Informasi nara sumber digunakan untuk mengetahui apakah dengan adanya dana BOS sudah dapat membebaskan siswa yang kurang mampu dari pungutan dan seberapa besar dampak BOS bagi peningkatan mutu pendidikan di sekolah.

Dokumen yang dikumpulkan oleh peneliti berbentuk dokumen pengelolaan dana BOS yaitu dokumen RAPBS tahun 2013, SPJ BOS tahun 2013, serta gambar-gambar yang berkaitan dengan pelaksanaan penggunaan dana BOS. Hasil penelitian dari observasi atau wawancara, akan lebih kredibel/dapat dipercaya kalau didukung dengan melihat bukti-bukti dokumen RAPBS, penerimaan uang, buku-buku keuangan, bukti pengeluaran, laporan keuangan dan dokumen lain yang terkait dengan pengelolaan keuangan BOS.

Data yang terkumpul dianalisis dengan teknik analisis deskriptif yaitu dideskripsikan dan diambil kesimpulan tentang masing-masing komponen dan indikator berdasarkan kriteria yang ditentukan. Data dari hasil wawancara, dan dokumentasi dianalisis secara kualitatif dengan teknik deskriptif kualitatif. Teknik analisis kualitatif yang digunakan adalah model interaksi dari Miles & Huberman (2009, p.16), yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan / verifikasi.

Analisis data kualitatif dilakukan dengan reduksi data, penyajian data dan penggambaran kesimpulan di mana di setiap

tahap disertai dengan *display* data. Teknik analisa data dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Reduksi data berupa proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Kegiatan tersebut termasuk (1) proses pemilihan data atas dasar tingkat relevansinya dengan setiap kelompok data, (2) menyusun data dalam satuan-satuan sejenis, (3) membuat koding data sesuai dengan kisi-kisi kerja penelitian tentang pengelolaan dana BOS. Reduksi data berlangsung terus menerus selama penelitian di SD Negeri D dan SD Negeri K. Reduksi data/proses transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun.

Data disajikan secara jelas dan sistematis. Data dalam hal ini adalah komponen-komponen yang mempengaruhi pengelolaan dana BOS di SD Negeri D dan SD Negeri K.

Penarikan kesimpulan sebagian dari satu kegiatan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan diverifikasi selama penelitian berlangsung dalam pengelolaan dana BOS di SD Negeri D dan SD Negeri K. Setelah proses verifikasi dilaksanakan dan data yang diperoleh memiliki kejelasan (sama dengan data yang telah diperoleh) maka dapat diambil kesimpulan yang baku dan selanjutnya dimuat dalam laporan hasil penelitian tentang pengelolaan dana BOS pada kedua sekolah tersebut.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

### Perencanaan Dana bos

Berdasarkan hasil wawancara dengan orang tua siswa diperoleh informasi bahwa peserta yang hadir hanya mendengarkan hasil penyusunan RAPBS yang telah disusun oleh sekolah dan secara aklamasi menyetujui hasil rapat untuk memenuhi syarat adanya partisipasi warga dan komite sekolah dalam perencanaan RAPBS.

Penggunaan sumber BOS diprioritaskan pada kegiatan pokok sekolah yang

dialokasikan untuk kegiatan kesiswaan, meliputi: pengembangan standar proses, pengembangan standar penilaian, pengembangan standar pembiayaan, dan pengembangan standar sarana prasarana yang mengacu pada 8 standar proses dan 13 Item komponen penggunaan dana BOS yang menunjang peningkatan kemajuan dan mutu sekolah.

### Pelaksanaan Dana BOS

#### *Penyaluran dana BOS*

Penyaluran dana BOS dilakukan tiap triwulan pada awal bulan pertama dalam triwulan.

#### *Pengambilan Dana BOS*

Pengambilan dana dilakukan oleh kepala sekolah dan bendahara BOS tetapi bila bendahara atau kepala sekolah berhalangan bisa salah satunya dengan surat rekomendasi dari pihak bank dan dana BOS diterima secara utuh tanpa ada pungutan dari pihak manapun.

Dari hasil observasi, wawancara dengan kepala sekolah, bendahara, guru dan beberapa orang tua serta kajian dokumen APBS dan SPJ BOS, didapat informasi tentang penggunaan dana BOS didasarkan atas keputusan bersama dan didukung dengan bukti dokumen notulen hasil rapat paripurna APBS dan daftar hadir penyusunan rapat APBS, bahwa dalam rapat tersebut kepala sekolah, bendahara, guru, komite dan perwakilan orang tua hadir dalam rapat. Dengan mempelajari laporan SPJ BOS dan bukti APBS bahwa penggunaan dana sesuai dengan rincian penyusunan APBS.

#### *Proses Pembukuan*

Ditjen Dikdas (2011, p. 165), menyebutkan ada dua komponen unsur transparansi yaitu: (1) adanya peraturan yang menjamin akses terhadap informasi (tepat, waktu, mudah dijangkau dan bebas diperoleh), dan (2) adanya mekanisme keterbukaan dan standarisasi pelayanan publik. Fakta di lapangan menunjukkan proses pembukuan keuangan dana BOS dari hasil wawancara dengan kepala sekolah, dan

bendahara, dan kajian dokumen dari kedua sekolah, menunjukkan bahwa bendahara telah melakukan pembukuan secara rutin setiap triwulan dan setiap tahun serta didukung dengan bukti dokumen APBS dan mempelajari laporan BOS. Pembukuan merupakan sumber informasi dari pertanggungjawaban keuangan yang akan disusun dalam bentuk laporan, Ditjen Dikdas (2011, p. 187). Demikian juga bendahara telah melakukan pembukuan sesuai dengan ketentuan secara terbuka (transparan) serta didukung dengan dokumen laporan SPJ BOS yang diletakkan di meja bendahara sehingga siapa saja bisa membukanya. Transparan berarti adanya keterbukaan.

#### *Proses Pembelian*

Mempelajari dokumen laporan SPJ BOS tahun 2013 tentang pembelian dan dari hasil wawancara dengan kepala sekolah, guru dan bendahara serta didukung bukti dokumen APBS tahun 2013 didapat informasi bahwa sekolah memperhatikan kualitas dan kewajaran harga barang/jasa dan dengan mempelajari URK pengadaan buku mata pelajaran. Namun tidak membentuk tim belanja barang dan tim penerima barang. Sedangkan pengeluaran uang sesuai dengan APBS, demikian juga transaksi pengeluaran disertai bukti kuitansi dan didukung dengan bukti lampiran SPJ

BOS tahun 2013 berupa bukti-bukti pembelian barang/jasa. Pihak sekolah juga menyetorkan pajak pembelian sesuai dengan ketentuan serta didukung dengan bukti buku pembantu pajak yang ada di laporan SPJ BOS.

#### *Akuntabilitas*

Dari hasil wawancara dengan kepala sekolah, komite, orang tua dan observasi berupa papan pengumuman keuangan BOS, didapat informasi yang menjelaskan bahwa akuntabilitas sekolah dalam menyampaikan pertanggungjawaban keuangan BOS dilakukan secara terbuka serta didukung bukti observasi berupa papan pengumuman keuangan BOS yang memperlihatkan tanggungjawab sekolah terhadap keuangan kepada masyarakat. Untuk lingkup manajemen keuangan sekolah/madrasah, akuntabilitas berarti pertanggungjawaban dana sekolah/madrasah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Pertanggungjawaban dapat dilakukan kepada orang tua siswa, masyarakat, maupun pemerintah, Ditjen Dikdasmen (2011, p. 164). Dan berdasarkan penjelasan guru, komite dan orang tua bahwa mereka merasa puas karena penggunaan dana BOS telah sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Akuntabilitas penggunaan Dana BOS SDN D dan SDN K

No Komponen/Sub komponen	Kriteria	SD Negeri D	SD Negeri K
Akuntabilitas	Sistem Pertanggungjawaban	Sekolah menyampaikan pertanggungjawaban keuangan BOS secara terbuka	Penyusunan RAPBS dimusyawarahkan bersama dengan guru, komite dan orang tua. SPJ BOS disampaikan kepada orang tua setiap akhir tahun atau awal tahun pelajaran
	Kepuasan warga sekolah tentang penggunaan dana BOS	Warga sekolah merasa puas karena dana BOS telah sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan. Hal ini merupakan tanggapan dari guru, komite dan orang tua murid	Sekolah selalu menginformasikan penggunaan dana kepada orang tua baik lewat rapat maupun diumumkan dipapan pengumuman. Komite dan orang tua merasa puas karena dana BOS telah sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan

### *Keterbukaan*

Berdasarkan bukti observasi dan dokumentasi tentang keterbukaan sekolah dan dari hasil wawancara dengan kepala sekolah, guru, komite dan orang tua di SD Negeri D diperoleh informasi bahwa ada informasi/spanduk sekolah gratis. Informasi dana BOS yang diterima dan penggunaan dana BOS ditulis di papan pengumuman yang diletakkan disekolah, sedangkan informasi barang yang dibeli dilakukan setahun sekali, meskipun akan lebih baik bila dilakukan setiap triwulan. Sekolah menyediakan kotak saran dan pengaduan sebagai wadah pengaduan. Selama ini tidak ada pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan penggunaan dana BOS.

Hasil observasi, studi dokumen tentang keterbukaan sekolah dan dari hasil wawancara dengan kepala sekolah, guru, komite dan orang tua di SD Negeri B diperoleh informasi tentang informasi/spanduk sekolah gratis dan kotak saran yang tidak di pasang, dengan alasan bahwa spanduk dan kotak saran sudah rusak. Walaupun spanduk sekolah gratis tidak dipasang, sekolah sudah melaksanakan pendidikan gratis. Informasi barang yang dibeli tidak ditulis dipapan pengumuman. Selama ini tidak ada pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan penggunaan dana BOS.

### Pengawasan dan Evaluasi Dana BOS

#### *Pengawasan*

Dari hasil wawancara dengan kepala sekolah, komite dan orang tua tentang pengawasan dana BOS menjelaskan bahwa pengawasan keuangan kedua sekolah dilakukan oleh kepala sekolah minimal tiap 3 bulan sekali, sedangkan pengawasan keuangan oleh Dinas terkait dalam bentuk monitoring dana BOS dilakukan 1 tahun sekali yang dilakukan oleh pengawas sekolah. Dua tugas utama para pengelola/*manager* adalah pada kegiatan perencanaan dan pengawasan. Dalam suatu usaha, pemerintah dan kelompok kegiatan, suatu sistem perencanaan dan pengawasan (disebut juga manajerial penganggaran) secara luas digunakan, hal ini menunjukkan tang-

gung jawab perencanaan dan pengawasan, Welsch (1988, p. 1). Kemudian pihak sekolah melakukan verifikasi dana dengan data siswa untuk memastikan jumlah dana yang diterima sesuai dengan jumlah siswa.

#### *Evaluasi*

Hasil wawancara dengan kepala sekolah, komite dan orang tua pada kedua sekolah tentang evaluasi dana BOS menjelaskan bahwa evaluasi pengelolaan dana dilakukan secara bertanggungjawab dan transparan. Evaluasi dilakukan baik secara formal maupun informal dan dilakukan minimal satu tahun sekali. Evaluasi oleh pihak dinas terkait dilaksanakan satu tahun sekali oleh Tim manajemen BOS Kabupaten.

### Pelaporan Dana BOS

#### *Laporan Intern*

Bentuk laporan pertanggungjawaban dana BOS dari hasil wawancara dengan kepala sekolah, guru, komite dan orang tua pada kedua sekolah tentang laporan intern BOS, menjelaskan bahwa bentuk laporan pertanggungjawaban dana BOS dibuat sesuai dengan ketentuan dalam juknis SPJ BOS dan sesuai dengan format yang berlaku. Laporan merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh sumber dana tertentu, Ditjen Dikdasmen (2011, p. 225). Sekolah juga menyampaikan kepada guru, komite sekolah dan orang tua murid pada saat rapat orang tua dan komite setiap akhir tahun. Laporan pertanggungjawaban dilakukan setiap triwulan.

#### *Laporan Ekstern*

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah, bendahara dan komite tentang laporan ekstern BOS dan mempelajari dokumen SPJ BOS tahun 2013, didapat keterangan bahwa laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada UPT dan dari UPT diserahkan kepada Tim Manajemen BOS Kabupaten setiap triwulan bahwa SPJ dilakukan setiap triwulan. Laporan pertanggungjawaban dilakukan 1 tahun 4 kali (triwulan) dan bila ada peng-

aduan disertakan lembar pencatatan pengaduan tetapi sampai tahun pelajaran 2013/2014 tidak ada pengaduan yang berkenaan dengan pengelolaan dana BOS.

## Simpulan dan Saran

### Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengelolaan dana BOS pada Sekolah Dasar Negeri di UPT Pelayanan Pendidikan Kecamatan Moyudan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

Simpulan pertama adalah perencanaan yang terdiri dari: (1) partisipasi warga pada kedua sekolah dalam perencanaan penggunaan dana sudah dilibatkan, namun belum optimal; dan (2) kedua sekolah memprioritaskan alokasi anggaran dalam RAPBS untuk kegiatan kesiswaan dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah.

Simpulan kedua adalah pelaksanaan, yang terdiri dari: (1) penyaluran dana BOS ke sekolah dilaksanakan di awal bulan dalam triwulan. Pengambilan dana dilakukan oleh kepala sekolah dan bendahara, tanpa ada pungutan dari pihak manapun; (b) proses pembukuan penggunaan dana BOS pada kedua sekolah dilaksanakan secara rutin sesuai dengan ketentuan, kegiatan ini dibuktikan dengan adanya catatan realisasi penggunaan dana BOS (K7), dan (c) prinsip akuntabilitas dan keterbukaan sudah dilaksanakan dengan baik oleh kedua sekolah.

Simpulan ketiga adalah pengawasan dan evaluasi, terdiri dari (a) pengawasan penggunaan dana BOS dilaksanakan oleh kepala sekolah dan pengawas dengan memeriksa SPJ BOS, (b) evaluasi pengelolaan dana BOS pada kedua sekolah dilaksanakan oleh Tim Manajemen BOS Kabupaten dengan cara datang ke sekolah untuk *monitoring* sekali dalam satu tahun.

Simpulan keempat adalah Pelaporan. Mekanisme pelaporan dana BOS dilaksanakan setiap triwulan oleh sekolah dengan mengirimkan SPJ BOS ke UPT Pelayanan Pendidikan, setelah dikoreksi kemudian dikirimkan kepada Tim Manajemen BOS Kabupaten.

### Saran

Berdasarkan hasil analisis penelitian di atas dapat diberikan saran-saran sebagai berikut: (1) sosialisasi peran komite tentang pengelolaan dana BOS perlu ditingkatkan; (2) peningkatan mutu pendidikan tidak hanya tanggung jawab pihak sekolah, namun keterlibatan *stakeholder* sebagai pengguna mutu lulusan perlu ditingkatkan dalam kegiatan di sekolah termasuk didalamnya perencanaan penggunaan dana; (3) pelatihan teknis pengelolaan dan pelaporan dana BOS secara rutin hendaknya dilaksanakan oleh Tim Manajemen BOS Kabupaten untuk meningkatkan kemampuan bendahara; (4) pengawasan dan evaluasi secara rutin oleh Tim Manajemen BOS Kabupaten minimal satu triwulan sekali.

### Daftar Pustaka

- Depdiknas. (2005). *Peraturan Pemerintah RI Nomor 19, Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan*.
- Ditjen Dikdasmen. (2011). *Peningkatan manajemen melalui penguatan tata kelola dan akuntabilitas di sekolah/madrasah. Materi pelatihan sekolah/madrasah*. Jakarta: Ditjen Dikdasmen dan Ditjen Pend Islam, Kemenag RI.
- Fattah, N. (2004). *Ekonomi & pembiayaan pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Hallak, J. (1969). *The analysis of educational costs and expenditure*. Unesco: International Institute for Educational Planning.
- Lunenburg, F. C., & Ornstein, A. C. (Eds). (2000). *Educational administration: Concepts and practice*. Houston: Wadsworth.
- Miles, M. B., & Huberman, A.M. (2009). *Analisis data kualitatif: buku sumber tentang metode-metode baru*. (terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi). London: Sage Publications, Inc,

- Mulyono. (2010). *Konsep pembiayaan pendidikan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 76. (2012). *tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2013*.
- Supriadi, D. (2006). *Satuan biaya pendidikan dasar dan menengah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Welsch, G. A., Hilton, R. W., & Gordon, P. N. (1988). *Budgeting profit planning and control*. London: Prantice Hall, Inc.